

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ekonomi Informal

1. Pengertian Ekonomi Informal

Aktivitas-aktivitas ekonomi meliputi semua kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang dan jasa. Pedagang bakso yang mengitari suatu area perumahan dengan jadwal tetap maupun tidak tetap, pengatur lalu lintas sukarela pada persimpangan padat, anak-anak penjaja Koran atau majalah di persimpangan jalan utama, pedagang baju atau tas kaki lima di depan pusat perbelanjaan, tukang semir sepatu di tempat pemberhentian bus, pedagang makanan di sekitar proyek pembangunan suatu gedung, buruh harian dari suatu perusahaan “kontraktor” bangunan, perusahaan konveksi yang mempekerjakan beberapa orang tenaga pekerja, tukang ojek, pembantu rumah tangga adalah semua orang yang memiliki aktivitas ekonomi. Karena mereka memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang ditawarkan pada suatu jaringan yang berakhir pada pengkonsumsian. Kesemua aktivitas ekonomi yang tersebut dinamakan ekonomi informal.¹

Konsep ekonomi informal muncul pertama kali di dunia ketiga, ketika dilakukan serangkaian penelitian tentang pasar tenaga kerja perkotaan di Afrika. Konsep informalitas ditetapkan kepada bekerja sendiri (*self employed*). Hart menekankan dinamisme dan perbedaan aktivitas ini yang dalam pandangannya melebihi anak-anak penyemir sepatu dan penjual geretan. Namun ciri-ciri dinamis dari konsep yang diajukan oleh Hart tersebut hilang ketika telah dilambangkan dalam birokrasi ILO, informalitas didefinisikan ulang sebagai sesuatu sinonim dengan kemiskinan. Ekonomi informal menunjuk kepada cara perkotaan melakukan sesuatu yang dicirikan dengan:

- a. Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi.

¹ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 157.

- b. Perusahaan milik keluarga
- c. Beroperasi pada skala kecil
- d. Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana
- e. Pasar yang tidak diatur dan kompetitif.²

Ciri-ciri tambahan yang muncul dari definisi seperti ini adalah tingkat produktivitas rendah dan kemampuan akumulasi rendah. Penelitian-penelitian yang dilakukan di bawah permintaan ILO dan Bank Dunia memperlihatkan bahwa pekerjaan dalam sector informal diartikan kekurangan pekerjaan dan diasumsikan sebagai dampak dari pekerja yang tidak bias masuk ke dalam ekonomi modern.

Karakteristik negatif dari sektor informal tersebut telah banyak mendapat tantangan dari berbagai ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang ini. Dari sisi alternatif, aktivitas informal dipandang sebagai suatu tanda dari dinamika kewiraswastaan masyarakat. Menurut Hernando de Soto dalam *The Other Path* informalitas merupakan respon masyarakat terhadap Negara merkantalis yang kaku. Oleh karena itu, tidak seperti gambaran ILO yang melihatnya sebagai mekanisme kelangsungan hidup dalam merespon ketidakcukupan lapangan pekerjaan modern, melainkan sebagai serbuan kekuatan pasar nyata dalam suatu ekonomi yang dikekang oleh regulasi (peraturan) Negara.³

Ekonomi informal, menurut Catells dan Portes, dapat dibagi secara fungsional berdasarkan tujuan mereka. *Pertama*, bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup oleh individu dan rumah tangga melalui produk substensi langsung atau melalui penjualan ke pasar dari barang-barang dan jasa-jasa yang mereka hasilkan sendiri.

Kedua, bertujuan untuk peningkatan fleksibilitas managerial dan pengurangan biaya tenaga kerja dari perusahaan sektor informal melalui

² *Ibid.*, hlm. 158.

³ *Ibid.*, hlm. 159.

subkontraktor kepada wiraswasta informal atau penggajian yang dicatat di dalam pembukuan tidak resmi.

Ketiga, bertujuan untuk akumulasi modal oleh perusahaan kecil melalui hubungan kesetiakawanan, fleksibilitas, dan pembiayaan yang rendah.⁴

2. Sektor Informal

Sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga yang terorganisasi. Sektor informal sebagai suatu realitas yang tidak terhindarkan di wilayah perkotaan. Digambarkan bahwa sektor informal sebagai bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang tidak terorganisir.⁵

Menurut pendapat lain sektor informal meliputi tindakan-tindakan aktor ekonomi yang gagal untuk menaati peraturan-peraturan kelembagaan yang telah mapan atau terabaikan dari perlindungan mereka.

Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Castells dan Portes yang dikutip oleh Alan Gilbert dan Josef Gugler, sektor informal meliputi semua aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang tidak diatur oleh Negara dalam lingkungan sosial di mana aktivitas yang sama diatur. Castells dan Ports memberikan klasifikasi di antara kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi formal, ekonomi informal, dan aktivitas ekonomi ilegal.

Secara umum dapat disimpulkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi dari pemerintah. Akan tetapi terdapat batasan yang tegas tentang sektor informal dalam ruang lingkup kegiatannya. Hanya saja sektor ini cenderung lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Sehingga, segala karakteristik dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 161.

⁵ Alan Gilbert & Josef Gugler, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1996, hlm. 95.

permasalahan sektor informal cenderung berhubungan dengan permasalahan kota.

Banyak para ahli sektor informal berpendapat bahwa salah satu kriteria sektor informal adalah mudah masuk ke dalam aktivitas tersebut. Sepintas lalu pendapat tersebut kelihatan benar, karena hampir di setiap kegiatan ekonomi terdapat bagian yang telah dimasuki oleh aktivitas sektor informal mulai dari produksi makanan sampai produksi obat-obatan, mulai dari jasa hiburan sampai kepada jasa keamanan, mulai dari pedagang loak sampai kepada pedagang emas, mulai dari tukang semir sepatu sampai kepada pembuat sepatu, dan seterusnya. Menjamurnya aktivitas ekonomi sector informal tersebut dipandang sebagai suatu kegiatan yang mudah untuk masuk ke dalamnya.⁶

Semakin metropolis sebuah daerah, maka semakin terbuka ruang bagi pelaku sektor informal untuk memasuki dan memenuhi sudut-sudut kota tersebut. Secara lebih mengerucut, keberadaan mereka biasanya tersebar di pusat-pusat kegiatan ekonomi yang memberikan peluang permintaan terhadap produk yang mereka tawarkan, entah itu di terminal, stasiun, sekitar pasar, dan pusat-pusat perbelanjaan modern. Apa yang kemudian terlihat adalah kegiatan ekonomi yang menempel, di mana kegiatan ekonomi formal berada maka pelaku sector informal akan berada di sekitarnya.

Keberadaan mereka juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat-pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota. Sarsana yang mereka gunakan adalah hamparan di lantai, meja/joglo, bedag sederhana (kios), gerobag/kereta dorong, pikulan, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi seperti ini banyak ditemui di wilayah perkotaan dan akan semakin banyak jumlahnya di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Samarinda, Yogyakarta, Malang, Medan, Padang, Surakarta, Palembang, dan lain sebagainya. Kegiatan sector informal ini

⁶ Damsar, *Op. Cit.*, hlm. 164.

muncul dan berkembang tanpa adanya tingkat modal, ketrampilan, dan pola usaha yang memadai karena memang hadir hanya sebagai respons atas segala kondisi ketidakberdayaan.⁷

Kenyataannya, suatu sektor ekonomi yang kemunculannya bahkan tidak dikehendaki oleh pelakunya sendiri itu, saat ini jumlahnya telah menggelembung sedemikian besar, bahkan hampir menyamai jumlah mereka yang bekerja di sektor formal itu sendiri. Dengan begitu saat ini tidak bisa dikatakan lagi bahwa sektor informal cuma sebagai tempat penampungan sementara bagi pekerja yang belum bisa masuk ke sektor formal, tetapi keberadaannya justru sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi (perkotaan) karena jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang sedemikian besar (sama dengan jumlah tenaga kerja sektor formal).⁸

3. Sebab Munculnya Sektor Informal

Sampai sejauh ini, pengertian tentang pembangunan ekonomi yang pokok adalah pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan sehingga menghasilkan transformasi structural dalam perekonomian. Dalam banyak segi, konsep pembangunan ekonomi tersebut memang cenderung untuk semakin mengurangi peranan sektor pertanian untuk digantikan sektor industry atau jasa dalam kegiatan ekonomi suatu Negara. Semakin cepat proses pergeseran sektor ekonomi itu terjadi, maka pembangunan ekonomi dianggap telah berhasil.

Sebagai implikasi dari konsep tersebut, kebijakan di Negara-negara berkembang kebanyakan diorientasikan bagi industri-industri yang memiliki konsentrasi modal tinggi. Sementara di sudut lainnya, sektor pertanian pedesaan tidak cukup mendapat perhatian yang selayaknya karena dianggap tidak bisa memacu pertumbuhan pendapatan nasional. Karena masuknya cara produksi baru yang padat modal ke dalam sistem agraria tradisional memaksa petani-petani yang tidak berketerampilan

⁷ Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2000, hlm. 175.

⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

kehilangan mata pencahariannya, bahkan akhirnya mereka harus menjual tanahnya.

Sekarang kota-kota telah tumbuh semakin pesat dengan ditandai oleh tiga hal. *Pertama*, jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin meningkat. *Kedua*, proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industry di kota hampir tidak dapat bertambah dan malahan mungkin berkurang. *Ketiga*, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai. Ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari setiap kota (metropolitan) sebagai akibat dari pola industrialisasi yang dijalankan secara serempak.

Dengan latar belakang seperti itulah, lahir fenomena sektor informal perkotaan di Negara-negara berkembang pada umumnya. Mereka melakukan urbanisasi dan tidak dapat tertampung pada sektor formal terpaksa harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dalam rupa sektor informal. Mereka yang menganggur di perkotaan tersebut untuk kembali lagi ke desa mereka menjumpai kondisi yang tidak menguntungkan, seperti sumber daya alam yang terbatas, upah renda, tidak memiliki tanah, dan lain sebagainya. Dengan begitu bahwa sektor informal merupakan “*holding tank*” bagi imigran yang belum sempat tertampung di sektor formal atau mereka yang pada saat itu termasuk pengangguran.⁹

Sektor informal di Negara-negara sedang berkembang muncul dari ketidakmampuan sektor formal untuk menampung antrian panjang pencari kerja. Situasi ini muncul sebagai konsekuensi logis dari kebijakan industri yang merupakan bagian sistematis dari apa yang disebut sebagai sektor formal. Dari pandangan tersebut, seperti yang telah dijelaskan. Bahwa perkembangan industrialisasi kapitalis modern akan menghilangkan aktivitas ekonomi informal. Di Negara-negara maju juga memperlihatkan peningkatan yang berarti. Oleh karena itu

⁹ *Ibid.*, hlm. 186-187.

ditekankan lagi, asumsi yang menyebutkan bahwa aktivitas ekonomi informal merupakan transit, konsekuensi dari penetrasi yang tidak sempurna dari kapitalisme modern ke dalam daerah-daerah yang kurang berkembang dan oleh karena itu akan hilang dengan adanya industrialisasi, dipertanyakan dalam penerapannya baik di Negara sedang berkembang maupun di Negara maju. Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan, sector informal tidak hanya fenomena Negara-negara berkembang tetapi juga fenomena Negara-negara industri.

Ada dua hipotesis yang sering diajukan oleh beberapa ilmuwan untuk menjelaskan sebab dari informalitas di Negara-negara maju. *Pertama*, munculnya ekonomi informal dihubungkan dengan pertumbuhan imigran. *Kedua*, informalitas dan desentralisasi merupakan respon terhadap pertumbuhan kekuatan serikat buruh.

Aktivitas informal dan yang berhubungan dengannya tidak tergantung pada keadaan-keadaan lokal tetapi berakar pada proses global penyesuaian ekonomi. Aktivitas tersebut merupakan strategi pekerja individu dan berhubungan dengan strategi fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perekonomian dunia.¹⁰

4. Ciri-ciri Sektor Informal

Sektor informal di daerah perkotaan Indonesia selalu menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Membengkaknya sektor informal tersebut berkaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap penambahan angkatan kerja di kota sebagai akibat migrasi desa-kota lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama di kalangan penduduk usia muda yang diikuti dengan membengkaknya sektor informal di kota.

Adapun ciri-ciri sektor informal di Indonesia adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Damsar, *Op. Cit.*, hlm. 172-173.

¹¹ Ahmad Erani Yustika, *Op. Cit.*, hlm. 195.

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
- b. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki ijin usaha.
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
- e. Unit usaha berganti-ganti dari suatu sub sektor ke sub sektor lain.
- f. Teknologi yang dipergunakan tradisional.
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil.
- h. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formula, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
- i. Pada umumnya unit usaha terasuk “*one man enterprise*” dan walaupun pekerja biasanya dari keluarga sendiri.
- j. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi.
- k. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi berpenghasilan menengah ke bawah.

Jika memakai patokan di atas, maka bentuk unit usaha sektor informal yang banyak di jumpai di Indonesia meliputi: usaha-usaha di bidang pertanian, misalnya buruh tani, peternak kecil, pedagang eceran (pemilik warung), pedagang kaki lima, pemilik bengkel sepeda, pemulung dan penarik becak di perkotaan. Sehingga dari beberapa ciri-ciri seperti itu, sektor informal kurang lebih dapat dimengerti sebagai suatu unit usaha yang dari skala ekonomis tidak memperhitungkan adanya kelayakan usaha, seperti permodalan, pembukuan, ketrampilan, pemasaran, perencanaan usaha, dan lain sebagainya. Serta lebih dari itu, selama ini keberadaannya sering dianggap ilegal oleh pemerintah dan karenanya tidak ada perlindungan dalam wujud produk hukum.

Tampak dari paparan pendefinisian tentang ciri-ciri sektor informal terdapat suatu pemahaman bahwa tidak semua fenomena sektor informal sebagai realitas tunggal, melainkan sebagai kenyataan yang bisa dikarakteristikan sesuai dengan latar belakang budaya, ekonomi, dan politik di mana pelaku sektor informal tersebut melakukan aktivitas ekonominya.¹²

B. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah. Arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan.¹³

Menurut pendapat lain pedagang kaki lima adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain baik berjualan ditempat terlarang ataupun tidak.¹⁴

Pedagang Kaki Lima menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan ekonomi menengah kebawah dengan harga yang dapat dijangkau oleh golongan tersebut. Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi diri mereka sendiri. Usaha sebagai Pedagang Kaki Lima telah mampu menunjukkan diri sebagai usaha mandiri yang memberikan penghasilan.

Kenyataan tersebut tidak mengejutkan bila mengingat urbanisasi merupakan arus perpindahan tenaga kerja yang berasal dari pedesaan ke

¹² *Ibid.*, halm. 196.

¹³ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 193

¹⁴ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Bisnis dan Pemasaran*, Alfabeta, Bandung, 1992. hlm 137.

daerah perkotaan. Motif utama para kelompok pendatang adalah karena adanya alasan ekonomi yang kuat. Motif tersebut didasari atas adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan.

Didaerah perkotaan terdapat kesempatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pedesaan. Pedagang Kaki Lima lebih sering memilih berlokasi disekitar kawasan-kawasan fungsional perkotaan. Dengan tujuan untuk memperoleh omzet pendapatan yang tinggi. Kawasan-kawasan tersebut dianggap sangat strategis karena merupakan daerah perdagangan, perkantoran, daerah wisata, pemukiman dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Adapun ciri-ciri dari pedagang kaki lima diantaranya:

- a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
- b. Tidak memiliki surat izin usaha.
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempatusaha maupun jam kerja.
- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.¹⁵

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Kegiatan PKL dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pedagang Kaki Lima Menetap

Kegiatan pedagang kaki lima yang menetap pada satu lokasi. Dengan kata lain, konsumen yang membutuhkan pelayanannya akan datang ke lokasi penjualan PKL tersebut.

- b. Pedagang Kaki Lima Berpindah

Bentuk kegiatan pedagang kaki lima di mana dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya hanya akan menetap pada satu waktu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 138.

tertentu saja selama menurut mereka lokasi tersebut tetap menguntungkan.

c. Pedagang Kaki Lima Berkeliling

Merupakan pedagang kaki lima yang pelaksanaan kegiatannya berkeliling dan selalu berusaha mendatangi konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang diperdagangkan.¹⁶

3. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima

a. Kondisi

Pedagang kaki lima lebih suka menempati lokasi usaha pilihan mereka sendiri dari pada melaksanakan anjuran pemerintah daerah untuk pindah ke lokasi penampungan yang tidak strategis dan jauh dari tempat tinggal PKL tersebut. Rendahnya penghasilan karena usahanya yang kecil serta kehadirannya di perkotaan dianggap merugikan pemerintah di antaranya terjadi kemacetan lalu lintas.

b. Potensi

Potensi utama yang dimiliki oleh PKL yang terbesar yaitu tingkat kemampuannya yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Di dalam hal ini untuk menjadi PKL tidak diperlukan ketrampilan khusus modal yang besar, ijin mengadakan usaha dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan suatu usaha pekerjaan. Para pedagang kaki lima perlu dibina, karena mempunyai dampak positif, yakni menyerap dan memperluas kesempatan kerja di sektor informal. Dengan pengolahan yang baik, keputusan-keputusan yang tepat dari sektor informal perdagangan kaki lima ini dapat melahirkan seorang wiraswasta yang sukses dan tangguh.¹⁷

¹⁶ Bagus Pramodhiatma Asihanto, *Implikasi Tempat Berjualan Terhadap Tingkat Pendapatan Sektor Informal (Studi Kasus di PPS Merjosari Kecamatan Lowokwaru Malang)*, Jurnal Ilmiah, hlm. 5. (diakses tanggal 18 Desember 2015).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

C. Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Secara etimologis, perdagangan atau jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.

Sedangkan secara terminologis, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi, perdagangan atau jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali memberikan pengertian, perdagangan atau jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilik, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bias barang dan bisa uang.¹⁸

Perdagangan memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu.¹⁹

¹⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 53.

¹⁹ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dan Dasar*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 116.

Transaksi yang berlangsung jujur dan adil amatlah ditentukan dalam perdagangan. Sesudah Islam menyatakan mengenai halalnya perdagangan (jual beli), maka selanjutnya telah diatur agar perdagangan yang berlangsung tidak secara tunai dilengkapi dengan dokumen tertulis.²⁰

2. Dasar Hukum

Islam memandang perdagangan atau jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi perdagangan atau jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang sedang dibutuhkan oleh pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas perdagangan atau jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di Masy’aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS al-Baqarah ayat 198)

Informasi tentang perdagangan atau jual beli dalam ayat diatas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan

²⁰ Ibid., hlm. 121.

perdagangan atau jual beli. Bersamaan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul saat menceritakan tentang orang Jahiliyah Arab. Sebelum mereka masuk Islam, sudah menjadi kebiasaan mereka apabila mereka melakukan haji sekaligus juga melakukan perniagaan. Kemudian, ketika mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bersama-sama dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan perdagangan atau jual beli bersamaan dengan ibadah haji, asalkan tidak melupakan esensi dari ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan atau jual beli merupakan hal yang syah dan mulia.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS al-Baqarah ayat 275)

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya : "...Dan persaksikanlah jika kalian melakukan jual beli..." (QS al-Baqarah ayat 282)

Ayat 275 secara jelas menunjukkan tentang kebolehan perdagangan/jual beli dan ayat berikutnya menunjuk pada perintah adanya persaksian di tengah berlangsungnya perdagangan/jual beli, dan hal ini hanya dapat dilakukan dalam perbuatan yang dilegalkan agama.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ فِي الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: " Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akhirat akan bersama-sama para Syuhada'.

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa perdagangan atau jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan

moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan perdagangan atau jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Perdagangan atau jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridla Allah.²¹

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Perdagangan atau jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap syah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama' madzhab berbeda pendapat.

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun perdagangan atau jual beli hanya satu yaitu ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridla yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *aqidain*, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Barang yang dibeli
- d. Nilai tukar pengganti barang

Perdagangan atau jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *shighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

²¹ *Ibid.*, hlm. 54-55.

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku.

Mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil-baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak syah transaksi perdagangan atau jual beli dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

- b. Syarat yang berkaitan dengan obyek perdagangan atau jual beli.

Obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak syah memperjualbelikan bangkai, darah daging babi, dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak syah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.

- c. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad, yaitu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya antara penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, Kabul sesuai dengan ijab, contoh: aku jual baju ini 10 ribu, pembeli menjawab: saya beli baju ini 10 ribu. Satu majelis disini tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan satu kondisi, meskipun antara keduanya berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama.

Tentang persyaratan terjadinya ijab dan qabul dengan lisan muncul istilah *ba'I al-mu'athah*, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun, seperti yang terjadi di swalayan. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan suatu kebiasaan di sebuah negeri. Menurutny di antara persyaratan terpenting dalam perdagangan atau jual beli adalah rela sama rela (*taradlin*), sementara perilaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerima dan menyerahkan barang menunjukkan proses ijab qabul yang telah menunjukkan taradin.

Menurut madzhab Syafi'i, *ba'I al-mu'athah* hukumnya tidak syah. Karenaperdagangan atau jual beli harus dilakukan melalui ijab dan qabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Menurutnya unsure utama perdagangan atau jual beli adalah kerelaan yang sangat tersembunyi dalam hati, dan harus dilahirkan dengan melalui kalimat ijab qabul. Akan tetapi pengikut madzhab Syafi'i periode belakang seperti al-Nawawi dan al-Baghawi menganggapnya syah kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²²

D. Produksi

1. Pengertian Produksi

Al-Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam artian luas. Al Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif.

Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan factor-faktor produksi capital, tenaga kerja, teknologi, managerial *skill*. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk (*from utility*), memindahkan tempat (*place utility*), dan menyimpan (*store utility*).²³

Menurut pendapat lain, produksi didefinisikan sebagai penciptaan guna dan penambahan nilai pada guna itu. Jika mengkonsumsi berarti mengambil guna, maka produksi berarti menaruh guna. Allah adalah

²² *Ibid.*, hlm. 57-59.

²³ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2007, hlm. 67.

pencipta sejati. Manusia hanyalah dapat mengubah bentuk materi serta menggunakannya untuk memenuhi keinginannya.²⁴

Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak dapat saling dilepaskan. Jika dalam konsep ekonomi Islam tujuan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan *masalah*, produsen dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan memberikan *masalah*. Produsen dan konsumen memiliki memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan ekonomi, yaitu mencapai *masalah* yang optimum.

Secara teknis, produksi dapat diartikan sebagai proses mentransformasi *input* menjadi *output*, tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan yang menghasilkan *output* serta karakter-karakter yang melekat padanya.²⁵

2. Faktor-faktor Produksi

Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai di mana suatu Negara dapat menghasilkan barang dan jasa.²⁶

Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan dalam empat jenis, yaitu:

²⁴ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dan Dasar*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.47.

²⁵ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 209.

²⁶ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 6.

a. Tanah dan sumber alam

Faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan dan sumber alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik.

b. Tenaga kerja

Faktor produksi ini bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan ketrampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam satu bidang pekerjaan.
- 2) Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan ahli memperbaiki TV dan radio.
- 3) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan insinyur.

Dalam Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Dalam kenyataannya, seorang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijualnya dengan harga setinggi mungkin (upah tinggi). Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Semua tanggung jawab buruh tidak berakhir pada waktu seorang pekerja meninggalkan pabrik majikannya. Ia mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi

kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung.

c. Modal

Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Beberapa contohnya adalah sistem pengairan, jaringan jalan raya, bangunan pabrik dan pertokoan, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan alat-alat pengangkutan.

d. Keahlian keusahawan

Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi, para pengusaha akan memerlukan ketiga factor produksi yang lain yaitu tanah, modal dan tenaga kerja. Keahlian keusahawan meliputi kemahirannya mengorganisasi berbagai sumber atau faktor produksi tersebut secara efektif dan efisien sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat.²⁷

3. Tujuan Produksi

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam islam yang bertujuan untuk memberikan *Mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan *mashlahah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan *kemashlahatan* yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang islami. Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.
Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa produsen sekadar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif dan inovatif menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia.
- c. Menyiapkan persediaan barang/jasa dimasa depan.
Sikap proaktif ini juga harus berorientasi kedepan, pertama, menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang; kedua, menyadari bahwa sumber daya ekonomi, baik *natural resources* atau *non natural resources*, tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang. Orientasi kedepan ini akan mendorong produsen untuk terus menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga akan senantiasa dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan pembangunan akan terjaga. Ajaran islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang

gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasan.

- d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri.²⁸

E. Produk

1. Pengertian Produk

Produk sebagai segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekedar barang-barang yang berwujud (*tangible*). Dalam arti luas, produk meliputi objek-objek fisik, jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran entitas-entitas ini.²⁹

Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran yang memberikan nilai bagi pelanggan sasaran. Penawaran ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam membangun hubungan yang menguntungkan bagi pelanggan.³⁰

- a. Tingkat Produk

Perencanaan produk harus berpikir tentang produk dalam tiga tingkat, masing-masing tingkat menambah lebih banyak pelanggan. Tiga tingkat produk, yaitu:

²⁸ Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.*, hlm. 210-211.

²⁹ Philip Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi Dua Belas Jilid 1*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 266.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 267

- 1) Manfaat inti

Ketika merancang produk, mula-mula pemasar harus mendefinisikan inti, manfaat penyelesaian masalah atau produk yang dicari konsumen.

- 2) Produk aktual

Pada tingkat kedua ini, para perencana produk harus mengubah manfaat inti menjadi produk aktual. Mereka harus mengembangkan fitur produk, desain, tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan. Sebagai contoh *BlackBerry* adalah produk aktual. Nama, komponen, gaya, fitur, kemasan dan atribut lain, semuanya telah digabungkan secara cermat untuk menghantarkan manfaat inti agar tetap terhubung.

- 3) Produk tambahan

Pada tahap ini perencana harus membangun produk tambahan disekitar manfaat inti dan produk aktual dengan menawarkan pelayanan dan manfaat konsumen tambahan.³¹

2. Klasifikasi Produk

Produk juga dapat diklasifikasikan berdasarkan konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini produk diklasifikasikan menjadi:³²

- a. Produk Konsumen (*consumer product*)

Barang Konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen terakhir untuk konsumsi pribadi. Pemasar biasanya menggolongkan produk dan jasa ini lebih jauh berdasarkan bagaimana cara konsumen membelinya. Produk konsumen dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

- 1) Produk kebutuhan sehari-hari (*convenience product*) merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang

³¹ *Ibid.*, hlm. 268

³² *Ibid.*, hlm. 269

tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera dan memerlukan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembelianya.

- 2) Produk belanja (*speciality product*) adalah produk dan jasa konsumen yang jarang dibeli dan pelanggan membandingkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya produk secara cermat. Contohnya: alat rumah tangga, pakaian, dan kosmetik.
- 3) Produk khusus (*specialty product*) adalah produk dan jasa konsumen dengan karakteristik unik atau identifikasi merek di mana sekelompok pembeli signifikan bersedia melakukan pembelian khusus. Umumnya jenis barang ini terdiri atas barang-barang mewah, dengan merek dan model yang spesifik, seperti mobil jaguar dan pakaian desain terkenal.
- 4) Produk yang tak dicari (*unsought product*) adalah produk konsumen yang mungkin tidak dikenal konsumen atau produk yang mungkin dikenal konsumen tetapi biasanya konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Contohnya: asuransi jiwa, jasa pra perencanaan pemakaman, donor darah untuk palang merah.³³

b. Produk industri (*industrial product*)

Produk industri adalah produk yang di beli untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Barang industri dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1) Bahan dan suku cadang.

Bahan dan suku cadang mencakup bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Bahan mentah terdiri dari produk pertanian (tepung, kapas, ternak, buah-buahan, sayur mayur) dan produk alami (iklan, kayu, minyak mentah, bijih besi). Bahan dan suku cadang manufaktur terdiri dari bahan komponen (besi, benang, semen, kabel baja) dan suku cadang komponen (motor kecil, ban, cetakan)

³³ *Ibid.*, hlm. 270.

2) Barang-barang modal

Adalah produk industri yang membantu produksi atau operasi pembeli, termasuk peralatan, instalasi dan aksesoris. Instalasi terdiri dari pembelian besar seperti bangunan (pabrik, kantor) dan peralatan tetap (generator, penekan bor, sistem komputer besar, lift). Peralatan aksesoris meliputi perlengkapan dan peralatan pabrik portabel (perkakas, truk pengangkut) dan perlengkapan kantor (komputer, mesin faks, meja).

3) Persediaan dan jasa

Persediaan mencakup persediaan operasi (pelumas, batu bara, kertas, pensil) serta barang perbaikan dan pemeliharaan (cat, paku, sapu). Persediaan merupakan produk kebutuhan sehari-hari dalam bidang industri. Karena persediaan ini biasanya dibeli dengan usaha atau perbandingan minimum. Jasa bisnis meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan (pembersihan jendela, perbaikan komputer) serta jasa konsultasi bisnis (hukum, konsultasi manajemen, iklan). Jasa semacam itu biasanya dipasok dalam suatu kontrak.³⁴

3. Produk dalam Ekonomi Syariah

Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Produk dalam suatu perdagangan juga hasil dari proses produksi.

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah (kebahagiaan), demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut.

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk di konsumsi sendiri atau di jual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup,

³⁴ *Loc. Cit.*, hlm. 270.

karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.

Begitu juga suatu produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan. Islam mengatur untuk membuat produk harus disesuaikan dengan konsumsi dan bahan-bahan untuk pembuatan produk tersebut juga harus diperoleh dengan benar. Islam melarang pembuatan suatu produk dengan barang-barang yang dilarang.³⁵

F. Modal Kerja

1. Pengertian Modal Kerja

Dalam membangun sebuah bisnis dibutuhkan sebuah dana atau dikenal dengan modal. Bisnis yang dibangun tidak akan berkembang tanpa di dukung dengan modal. Modal dibutuhkan setiap perusahaan untuk membiayai kegiatan oprasionalnya, dimana modal yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan melalui hasil penjualan produksinya. Selanjutnya modal kerja yang berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan untuk membiayai kegiatan oprasional selanjutnya.

Modal memainkan peranan penting dalam berproduksi, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit untuk dikerjakan. Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selain meningkatkan produksi, *employment* juga akan meningkat jika barang-barang modal seperti bangunan dan mesin diproduksi jika kemudian digunakan untuk proses produksi lebih lanjut.³⁶

Secara umum modal adalah setiap betuk kekayaan yang dimiliki untuk memproduksi lebih banyak kekayaan.³⁷ Modal (*capital*)

³⁵ Muhammad Syarif Chaudry, *OP. Cit.*, hlm. 47.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 202.

³⁷ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*, ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2011. hlm 217

adalah segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak lagi untuk perusahaan.³⁸ Menurut konsep fungsional modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi, yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek (*current income*) yang sesuai dengan maksud utama didirikannya usaha tersebut.³⁹

Pendapat lain menjelaskan modal kerja adalah modal yang harus di keluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Selain modal kerja, modal yang dikeluarkan di awal untuk jangka panjang disebut modal awal. Sedangkan untuk membayar biaya operasi bulanan disebut modal operasional.⁴⁰

Dari beberapa pengertian di atas, modal adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mengelola dan membiayai usaha dagangan setiap bulan/setiap hari. Di mana di dalamnya terdapat ongkos untuk pembelian sumber-sumber produksi yang digunakan untuk memproduksi, yang kemudian akan mendapatkan hasil atau pendapatan bagi pemilik modal.

2. Jenis-jenis Modal

Dalam kerangka wirausaha, secara garis besar modal dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

a. Modal intelektual

Modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan.

³⁸ Thomas W, Zimmerer, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 217.

³⁹ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014. hlm 67.

⁴⁰ Saban Echdar, *Manajemen Entrepreneurship- Kiat Sukses Menjadi Wirausaha*, Andi, Yogyakarta, 2013, hlm. 45.

b. Modal sosial dan moral

Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga membentuk citra. Seorang wirausaha yang baik biasanya memiliki etika wirausaha seperti: kejujuran, memiliki integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, warga Negara yang baik dan taat hukum, mengejar keunggulan, dan bertanggung jawab.

c. Modal mental

Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama, diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan.

d. Modal material

Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang.⁴¹

3. Sumber-sumber Modal

Pada dasarnya modal dalam suatu usaha dikenal dua jenis modal, yaitu:

a. Modal aktif.

Modal aktif disebut juga harta, terbagi menjadi dua golongan, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal aktif digunakan untuk membiayai semua pengadaan kebutuhan fisik dan non fisik dalam jangka waktu lama disebut modal tetap (aktiva tetap). Yang termasuk modal tetap seperti peralatan, gerobak, bangunan dan lain-lain. Sedangkan modal kerja adalah modal aktif yang digunakan untuk menjalankan operasi dan proses produksi, seperti pembelian bahan baku, membayar upah atau gaji, membayar listrik dan lain-lain.

⁴¹ Suryana, Kewirausahaan: Kiat Proses Menuju Sukses, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 82.

b. Modal pasif.

Modal pasif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Modal asing (hutang)

Hutang atau modal asing adalah modal yang berasal dari luar usaha yang sifatnya sementara dioperasikan dalam menjalankan usaha. Modal tersebut bagi pemilik merupakan kewajiban yang pada saatnya harus dibayar kembali. Hutang atau modal bisa diperoleh dari perorangan maupun bank atau lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴²

2) Modal sendiri (ekuitas)

Modal sendiri pada dasarnya modal yang berasal dari pemilik usaha dan yang tertanam dalam usaha. Ditinjau dari sudut likuiditas modal sendiri merupakan modal jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Selain dari luar usaha (sumber eksternal), modal sendiri juga dapat berasal dari usaha sendiri (sumber internal). Pendanaan modal sendiri mencerminkan investasi pribadi dari pemilik.⁴³

Modal sendiri terdiri atas:

- a) Modal saham, saham adalah tanda bukti adanya bagian kepemilikan atau anggota dalam suatu perusahaan.
- b) Cadangan terbentuk dari laba yang diperoleh selama beberapa waktu yang lalu atau dari tahun yang berjalan.
- c) Laba ditahan yang diperoleh suatu perusahaan sebagian dapat dibayarkan sebagai dividend an sebagian ditahan oleh perusahaan.

Modal kerja merupakan jumlah dana yang yang dapat menghasilkan pendapatan pendek bisa berupa kas, persediaan barang dagang, piutang, dan penyusutan aktiva tetap. Adapun

⁴² Najmudin. *Op. Cit.*, hlm. 217-218.

⁴³ *Ibid*, hlm. 225.

aktiva lancar seperti surat-surat berharga dan keuntungan dalam piutang (*profit margin*) digolongkan sebagai modal kerja potensial. Aktiva tidak lancar seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain digolongkan sebagai *non working capital*.⁴⁴

Jenis-jenis modal kerja yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel :⁴⁵

a) Modal kerja permanen

Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus terus menerus ada dalam rangka kontinuitas usaha. Modal kerja permanen digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- (1) Modal kerja minimum, yaitu modal kerja minimum.
- (2) Modal kerja normal, yaitu modal kerja untuk menyelenggarakan produksi yang bersifat fleksibel.

b) Modal kerja variabel

Modal kerja variabel ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jenis modal kerja ini dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- (1) Modal kerja musiman. Modal kerja ini mengalami perubahan karena fluktuasi musim. Misalnya penjual pakaian pada musim menjelang lebaran mereka membutuhkan modal untuk memenuhi persediaan busana muslim sesuai dengan modal yang sedang tren.
- (2) Modal kerja siklus. Modal kerja siklus perubahannya mengikuti pola atau fluktuasi konjungtur.

⁴⁴ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm. 50.

⁴⁵ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 4.

(3) Modal kerja darurat (*emergency working capital*).

Modal kerja ini besarnya berubah-ubah disebabkan situasi darurat yang diperkirakan akan terjadi

Dari penjelasan di atas pada hakikatnya modal kerja merupakan jumlah yang harus terus menerus ada dalam menopang usaha yang menjembatani antara pengeluaran untuk memperoleh bahan atau jasa, dengan waktu penerimaan penjualan, jarak tersebut dinamakan periode perputaran modal kerja. Semakin pendek periode perputaran maka semakin cepat perputarannya. Lama atau cepatnya perputaran ini akan menentukan pula besar atau kecilnya kebutuhan modal kerja.

Adapun faktor-faktor yang menentukan jumlah modal kerja diantaranya, adalah:⁴⁶

- a. Besar kecilnya kegiatan usaha, di mana semakin besar kegiatan usaha semakin besar modal kerja yang dibutuhkan, apabila hal lainnya tetap. Selain besar kecilnya usaha, sifat suatu usaha juga mempengaruhi besarnya modal.
- b. Kebijakan tentang penjualan (kredit atau tunai). Persediaan, saldo ke kas minimal, dan pembelian bahan (tunai atau kredit).
- c. Faktor lainnya:
 - 1) Faktor-faktor ekonomi
 - 2) Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan uang ketat atau kredit ketat
 - 3) Tingkat bunga yang berlaku
 - 4) Peredaran uang
 - 5) Tersedianya bahan-bahan di pasar
 - 6) Kebijakan perusahaan lainnya.

Untuk menentukan jumlah modal yang diperlukan terdapat beberapa faktor yang perlu dianalisis, diantaranya:⁴⁷

- a. Sifat umum atau tipe usaha

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁴⁷ Jumingan, *Op. Cit.*, hlm 69-71.

- b. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang dan ongkos produksi per unit atau harga beli per unit barang itu.
- c. Syarat pembalian dan penjualan
- d. Tingkat perputaran persediaan
- e. Tingkat perputaran piutang
- f. Pengaruh konjungtur (*business cycle*)
- g. Derajat resiko
- h. Pengaruh musim
- i. *Credit rating* (kemampuan meminjam uang).

4. Modal Kerja dalam Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, dilarang oleh al-Quran.

Ekonomi Islam dalam konsep pengembangan modal memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terarah, antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkannya pada tiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan catatan segala bentuk pengembangan yang akan dilakukan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan syari'ah yang ada sebagaimana yang diatur dalam *Syari'ah Mu'amalah*.

Modal dalam ilmu ekonomi Islam dipandang sebagai sesuatu yang khusus karena dalam Islam ada larangan yang tegas mengenai riba atau bunga yang dapat merugikan pekerja. Modal adalah suatu yang diharapkan dapat memberikan penghasilan pemiliknya tanpa harus mengambil bunga darinya. Tabungan yang terkumpul dari masyarakat menjadi sejumlah modal. Akumulasi tabungan yang terkumpul sebagai modal digunakan perusahaan untuk menyediakan barang modal dalam melakukan produksi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional, hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh bukan dari presentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.⁴⁸

Dengan demikian, dengan adanya pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, diharapkan akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi. Kepemilikan atas faktor-faktor produksi dalam jumlah besar (khususnya modal) dapat dibatasi dan terkontrol dengan baik untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemilik modal terhadap mereka yang sangat butuh terhadap faktor produksi tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan adanya imbalan berupa laba bagi peranan modal dalam proses produksi yang bersifat tidak tetap sesuai dengan kondisi suatu perusahaan yang suatu saat mengalami keuntungan serta asumsi pada suatu saat akan mengalami kerugian.

G. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil penjualan barang dagang. Penjualan timbul karena terjadi transaksi jual-beli barang antara penjual dan

⁴⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 314.

pembeli. Tidak peduli apakah transaksi tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai, kredit, atau sebagian tunai atau sebagian kredit. Selama barang sudah diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, hasil penjualan tersebut sudah termasuk sebagai pendapatan.⁴⁹

Pendapatan diartikan sebagai hasil dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Pengertian ini menuju kepada barang dan jasa yang diperoleh dari setiap pekerjaan yang dilakukan tersebut.

Pendapatan atau upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta. Islam telah menganjurkan seseorang untuk mencari pendapatan/ upahnya sendiri. Sebuah hadits dari Nabi menyebutkan:

مأكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده (رواه البخاري)

Artinya: "Tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik dibanding jika ia memakan dari jerih payahnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud selalu makan dari hasil usahanya sendiri."

Ibnu Hajar berpendapat: "Di atas itu yang termasuk pekerjaan yang dihasilkan dengan tangannya sendiri adalah harta yang diperoleh dari orang kafir dan hal itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini merupakan jenis pekerjaan tertinggi karena diorientasikan untuk menegakkan kalimat Allah." Ibnu Mundzir berpendapat: "Pekerjaan paling utama yang dihasilkan dengan jerih payah sendiri adalah jika pekerjaan itu dilakukan dengan ikhlas." Sesuai dengan sabda Nabi:

خير الكسب كسب الرجل يدي العا مل أذاصح (رواه البيهقي)

Artinya: "Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan jerih payah seorang pekerja jika ia ikhlas."

⁴⁹ Kuswadi, *Pencatatan Keuangan Usaha Dagang untuk Orang-Orang Awam*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 40.

Apa yang menjadi hak pekerja, maka ia berhak untuk memanfaatkannya dalam semua hal yang diperbolehkan oleh Allah, seperti untuk membeli makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, pakaian, dan sebagainya

Secara garis besar konsep pendapatan dapat ditinjau dua segi yaitu:

a. Menurut Ilmu Ekonomi

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengaharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.⁵⁰

b. Menurut Ilmu Akuntansi

Banyak konsep pendapatan didefinisikan dari berbagai literature akuntansi dan teori akuntansi. Namun pada dasarnya konsep pendapatan dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu:

- 1) Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan.

⁵⁰ Sofyan safri hararap, *teori akuntansi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 31.

- 2) Pandangan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyerahan barang dan jasa atau *outflow*.⁵¹.

2. Sumber Pendapatan

Pendapatan (*income*) dari seseorang adalah hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Dan sektor produksi membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar. Harga faktor produksi di pasar faktor produksi ditentukan oleh tarik menarik antara penawaran dan permintaan.

Secara singkat pendapatan seseorang ditentukan oleh:

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun-tahun lalu dan warisan atau pemberian.
- b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar.⁵²

Pendapatan yang akan diperoleh pedagang kaki lima sangat ditentukan oleh berbagai faktor, diduga yang mempengaruhi pendapatan tersebut antara lain adalah modal kerja, jam usaha dan pengalaman berdagang serta jenis barang dagangan (produk). Kemudian pendapatan yang diterima sesama pedagang kaki lima juga berbeda, hal ini yang menyebabkan perbedaan pendapatan tersebut adalah tidak sama besarnya modal kerja yang dimilikinya, juga berbeda jam usaha yang dipergunakan untuk berdagang, serta bedanya pengalaman (lamanya berdagang) dan berbeda banyaknya jenis barang dagangan (produk) yang digelarkannya. Berikut adalah pengertian pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan berupa uang yaitu sebagai penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan biasanya diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi yaitu melalui pendapatan:

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵² Boediono, *Pengantar Ilmu Ekoomi No. 1 Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta, 2012, hlm. 170.

- b. Gaji dan upah yang diperoleh kerja pokok, kerja lembur, kerja sampingan dan kerja kadangkadang.
- c. Dari usaha sendiri, yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, komisi, penjualan dan kerajinan rumah tangga.
- d. Dari hasil investasi seperti bunga, modal, tanah.
- e. Dari keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.
- f. Pendapatan berupa barang adalah sebagai penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterima dalam bentuk barang dan jasa. Barang/jasa yang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa tersebut.
- g. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah, warisan, dan menang judi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan keluarga/ perseorangan yang berbentuk uang maupun dalam bentuk lain yang diuangkan dari hasil usaha yang dilakukan perseorangan/ anggota keluarga.⁵³

3. Pendapatan Menurut Pandangan Islam

Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas diantara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak

⁵³ Bagus Pramodhiatma Asihanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.⁵⁴

Semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan car-cara melawan hukum dilarang. Mendapatkan harta benda atau barang dagang dengan cara curang termasuk perbuatan yang dilarang.

Islam mengakui pendapatan adalah sebagai hasil dari modal yang tidak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.⁵⁵

H. Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar, dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri.⁵⁶

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu: berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia,

⁵⁴ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 310.

⁵⁵ Nur Rianto Al Arif, *Op. Cit.*, hlm. 144.

⁵⁶ Irwan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm. 5.

dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.⁵⁷

Dari definisi tersebut pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus.
- b. usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.
- c. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
- d. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, social, dan budaya). Sistem perbaikan kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi dan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal).⁵⁸

Dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan ada perkembangan atau pembangunan ekonomi kalau tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan-perubahan dalam kembangan dan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak itu. Pertumbuhan dapat meliputi penggunaan input lebih banyak dan lebih efisien, yaitu adanya kenaikan output per satuan input, dengan kata lain dengan kesatuan input dapat menghasilkan output yang lebih banyak.⁵⁹

2. Manfaat Pembangunan Ekonomi

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Kesejahteraan tergantung pada bagaimana pandangan seseorang terhadap kehidupan manusia. Orang yang kaya belum tentu

⁵⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, YKPN, Yohyakarta, 1999, hlm. 11.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵⁹ *Op. Cit.*, hlm. 6.

lebih sejahtera dibandingkan dengan orang miskin. Seseorang belum tentu merasa lebih sejahtera kalau penghasilannya bertambah. Kekayaan akan menambah kebahagiaan kalau kekayaan itu menambah alat-alat pemuas kebutuhan dan bukannya menambah jumlah kebutuhan, kekayaan pula dapat mengurangi kebahagiaan apabila kekayaan tersebut menyebabkan orang hidup dengan rasa khawatir, baik khawatir terhadap kekayaan yang dimiliki maupun alat-alat pemuas kebutuhan pada masa-masa yang akan datang, misalnya harus dipikirkan perlunya penghematan energy, pemeliharaan lingkungan, penghematan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Di dalam perekonomian yang lebih primitif, orang dipaksa bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidupnya sekedar untuk tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang.⁶⁰

3. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum Teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dapat dibagi menjadi 2, yaitu dari mazhab historismus dan mazhab analitis yang mencakup teori Klasik, Neo-Klasik dan Keynesian. Berikut penjelasannya:

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Mazhab Historismus

Aliran mazhab historismus ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Metode kajian mazhab ini bersifat induktif empiris. Dalam alam pikiran mazhab ini fenomena ekonomi adalah produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tetentu dalam

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

perjalanan sejarah. Pelopor aliran mazhab historismus antara lain, Frederich List, Karl Bucher, Bruno Hildebrand, dan W.W. Rostow.⁶¹

1) Pertumbuhan ekonomi Frederich list

Menurut List perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi, jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. List juga menegaskan bahwa Negara dan pemerintah harus melindungi golongan lemah di antara masyarakat.

Perkembangan ekonomi menurut List melalui 5 tahap, yaitu: tahap primitive, beternak, pertanian, dan industry pengolahan (*manufacturing*), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Selain itu, List juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang dan adanya pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien.⁶²

2) Teori pertumbuhan ekonomi Karl Bucher

Pada tahap Perekonomian menurut Karu Bucher ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

- a) Produksi untuk kebutuhan sendiri.
- b) Perekonomian kota dimana pertukaran sudah meluas.
- c) Perekonomian nasional dimana peran pedagang menjadi semakin penting.

⁶¹ *Op. Cit.*, hlm. 46.

⁶² *Ibid.*, hlm. 47

3) Teori pertumbuhan ekonomi Bruno Hildebrand

Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan alat tukar-menukarnya, yaitu:

- a) Perekonomian barter.
- b) Perekonomian uang.
- c) Perekonomian kredit.

4) Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitmen Rostow

W.W.Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut:

a) Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Merupakan masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai.⁶³

b) Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (*the preconditions for take off*)

Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi dan sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri.⁶⁴

c) Periode Lepas Landas (*The take off*)

Merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghaang pada pertumbuhan yang berkelanjutan, kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas, tingkat investasi yang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 48.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

efektif dan tingkat produksi dapat meningkat, investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional, dan Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.⁶⁵

d) Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)

Merupakan perkembangan terus menerus dimana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern, investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10 % hingga 20 % dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat, *output* dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk, barang-barang yang dulunya diimpor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri, serta tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa take off dengan penerapan teknologi modern.⁶⁶

e) Tingkat Konsumsi Tinggi (*high mass consumption*)

Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin (*leading sector*) bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa, pendapatan riil per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan, sandang, dan pangan, kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi, dan dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi.⁶⁷

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Mazhab Analitis

Teori-teori pembangunan dalam mazhab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

asaa (konsisten), tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada aspek empiris (historis) nya. Metode kajian mazhab ini bersifat deduksi teoritis. Kecenderungan semacam ini lebih jelas dalam teori-teori pertumbuhan modern.

1) Teori pertumbuhan ekonomi klasik

a) Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith

“An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation”, teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (Teori tangan-tangan gaib). Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu :⁶⁸

(1) Pertumbuhan penduduk.

(2) Pertumbuhan output total.

b) Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus

Perangkat teori yang dikembangkan David Ricardo ada 4 kelompok permasalahan, yaitu: teori tentang nilai dan harga barang, dan berkaitan dengan itu, teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang perdagangan internasional, dan teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁹

2) Teori pertumbuhan ekonomi Neo klasik

Teori pertumbuhan Neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

a) Teori pertumbuhan ekonomi Robert Sollow

Rober Sollow lahir pada tahun 1950 di Brookyn, ia seorang peraih nobel di bidang dibidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan out put yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama. Yaitu modal dan tenaga kerja.⁷⁰

b) Teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar

RF. Harrod dan Evsey Domar tahun 1947 pertumbuhan ekonomi menurut Harrod dan domar akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja.⁷¹

c) Teori pertumbuhan ekonomi Joseph Schumpeter

Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru di bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi.⁷²

4. **Pertumbuhan Ekonomi Menurut Ekonomi Syariah**

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 64.

⁷² *Ibid.*, hlm. 69.

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan, akan menjadi suatu kualitas pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distribusi dan kepedulian terhadap alam. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara individu dan kepentingan masyarakat. Cita-cita dari ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya dihadapan Allah SWT. Keuntungan material yang dicapai dalam setiap kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita berupa kepatuhan kepada Allah SWT.⁷³

I. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Deden Muhammad Haris (2011) tentang “Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan.” Hasil penelitian PKL sebagai bagian ekonomi sektor informal layak untuk dikembangkan sebagai suatu alternatif penanggulangan kemiskinan dengan berbagai cara pengembangan dan pemberdayaannya di perkotaan, tanpa melupakan pengembangan perekonomian di sektor lainnya baik di perkotaan dan di pedesaan.⁷⁴

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian memfokuskan tentang pemberdayaan PKL sedangkan peneliti memfokuskan tentang peningkatan pendapatan PKL. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang PKL.

⁷³ Almizan, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 207

⁷⁴ Deden Muhammad Haris, “Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan”, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2011, hlm. 245.

2. Penelitian Asmuni dan Abdul Hakim (2014) tentang “Evaluasi Kebijakan Ekonomi Sektor Informal: Studi Terhadap Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.” Hasil penelitian itu menunjukkan evaluasi proses pelaksanaan penertiban dan penataan PKL menunjukkan bahwa selama lima tahun berjalannya kebijakan terhadap keberadaan PKL belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara kondisi yang diharapkan dengan hasil kebijakan yang telah dicapai. Selain itu, hasil kebijakan juga melihat bahwa relokasi PKL di beberapa kawasan PKL pernah dilakukan tetapi hasilnya cukup mengecewakan.⁷⁵

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima, sedangkan peneliti tentang peningkatan pendapatan pedagang. Sedangkan persamaannya adalah penelitian sama-sama berfokus tentang pedagang.

3. Penelitian Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simatupang (2008) tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta).” Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor-faktor seperti jam kerja, pengalaman pengeceran sebelum mandiri, pengalaman pada posisi sekarang, dan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan bersih pedagang kaki lima.⁷⁶

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sedangkan peneliti berfokus membahas tentang peningkatan pendapatan pedagang. Sedangkan persamaannya adalah penelitian sama-sama berfokus tentang pendapatan pedagang.

⁷⁵ Asmuni dan Abdul Hakim, “Evaluasi Kebijakan Ekonomi Sektor Informal: Studi Terhadap Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember”, *Jurnal Reformasi*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 7.

⁷⁶ Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simatupang, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 2, 2008, hlm. 37

4. Penelitian Eko Handoyo (2013) tentang “ Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi.” Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Pemkot Semarang memindahkan PKL jalan Pahlawan ke jalan Menteri Soepeno adalah untuk mewujudkan kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, produktif dan berkelanjutan. Modal sosial, utamanya *trust* dan *net working* berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang, yaitu terpenuhinya kebutuhan minimal pedagang yang dalam jangka panjang menjamin kelangsungan hidup pedagang.⁷⁷

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tentang kebijakan pemerintah dan relokasi pedagang. sedangkan peneliti berfokus membahas tentang peran modal kerja dan peran jenis produk untuk meningkatkan pendapatan pedagang. Sedangkan persamaannya adalah penelitian sama-sama berfokus pada kesejahteraan pedagang.

5. Penelitian Dicky Eka Prasetya Adi dan Suwondo (2013) tentang “Implementasi Program “*Morning On Panglima Street* (MPS2)” Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Dinas Koperasi, Energy Mineral, Industri Dan Perdagangan Dan Bappeda Kota Probolinggo).” Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa omzet pelaku UMKM mengalami kenaikan. Faktor penghambat yang muncul yaitu permasalahan teknis dan faktor pendukungnya adalah komunikasi yang efektif dan dukungan dari UMKM yang selalu berkreasi.⁷⁸

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini berfokus tentang kenaikan omzet UMKM, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kenaikan omzet, sedangkan peneliti berfokus membahas

⁷⁷ Eko Handoyo, “ Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi”, *Jurnal Komunitas* 5 (2), 2013, hlm. 265.

⁷⁸ Dicky Eka Prasetya Adi dan Suwondo, “*Morning On Panglima Street* (MPS2)” Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Dinas Koperasi, Energy Mineral, Industri Dan Perdagangan Dan Bappeda Kota Probolinggo)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 5, 2013, hlm.821.

tentang meningkatkan perekonomian pedagang. Sedangkan persamaannya adalah penelitian sama-sama berfokus pada pedagang.

J. Kerangka Berpikir

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Subjek penelitian akan melaksanakan penelitian pada kegiatan PKL di *car free day*. Penelitian ini untuk mengetahui apakah kegiatan *car free day* yang dilakukan sepekan sekali dapat meningkatkan perekonomian para PKL.

Di acara *car free day* ini para PKL di bagi menjadi dua bagian yaitu PKL yang berjualan barang dagangan yang bersifat basah seperti makanan dan minuman, dan PKL yang berjualan barang dagangan yang bersifat kering seperti pakaian, aksesoris, tas, kerudung dan lainnya.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

